

The Effect of Corporate Governance and Political Connections on The Application of Conditional Conservatism

Herawansyah ¹⁾

Universitas Pat Petulai

Rini Indriani ²⁾

Nadine Nathasya Sitorus ³⁾

Universitas Bengkulu

herawansyah89@gmail.com

rindriani@unib.ac.id

Abstract

This study aimed to examine the effect of corporate governance and political connections on the application of conditional conservatism. The sample in this study are non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2012-2018. The number of samples in this study were 82 non-financial companies. Data analysis was performed with multiple regression analysis. The result of study showed that board of commissioner, audit committee size, audit committee independence, and institutional ownership have an effect on conditional conservatism. This study also has a result that political connections have a negative influence on conditional conservatism. It means more higher the companies have indicated by political connections, the lower the application of conditional conservatism. Variable board of director, independence commissioner, auditor expertise, the quality of the accounting firm which is proxied by BIG4, and managerial ownership have no effect on conditional conservatism.

Keywords: *Corporate governance, political connections, conditional conservatism*

Pendahuluan

Tuntutan bagi suatu perusahaan adalah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, agar kinerja suatu perusahaan dapat dilihat oleh pihak terkait, seperti pihak internal yang merupakan pihak manajemen, serta pihak eksternal yaitu investor, kreditor, dan pemerintah. Guna mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, maka perusahaan harus memiliki pertimbangan mengenai penerapan konservatisme akuntansi. Kootanaee *et. al.*, (2013) mengatakan konservatif akuntansi mengantisipasi segala kerugian dan bukan keuntungan. Lafond dan Watts (2007) menjelaskan untuk mengurangi kesempatan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan disarankan menggunakan prinsip konservatisme akuntansi, karena dapat membantu meminimalkan biaya agensi yang muncul akibat asimetris informasi. Teori keagenan menyebabkan beberapa hal dan yang paling sering terjadi adalah pencatatan laba yang tinggi karena adanya insentif dari manajemen perusahaan yang diukur dari kinerja manajemen dalam mencapai laba, serta sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi. Hal-hal tersebut menyebabkan manajer terdorong untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait LKT per 31 Desember 2018, dimana perusahaan mengakui penghasilan yang menurut dewan komisarisnya belum saatnya mengakui penghasilan tersebut (Prastowo, 2019), serta kasus Jiwasraya yang berdasarkan catatan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang menyatakan bahwa meskipun pada tahun 2006 Jiwasraya menghasilkan laba yang sebenarnya merupakan laba semu yang dihasilkan dari rekayasa akuntansi. (Rachman dan Afriyadi, 2020)

Alasan perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan adalah agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, yang artinya dalam implementasi tata kelola perusahaan tersebut biasanya telah diatur kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan dan ditaati peraturannya. Salah satu yang memegang peranan penting dalam menjalankan tata kelola perusahaan adalah dewan komisaris independen seperti pada penelitian Nasr dan Ntim (2018) yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen dapat memonitor aktivitas manajemen dan

mengendalikan para manajer agar lebih konservatif pada laporan keuangan mereka.

Lara *et. al.*, (2009) menggunakan konservatisme akuntansi berdasarkan dua perhitungan akrual dan pasar untuk memberikan informasi berkenaan dengan konservatisme akuntansi bersyarat. Ruch dan Taylor (2015) menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi bersyarat lebih lazim digunakan dari pada konservatisme akuntansi tidak bersyarat, karena menginformasikan peristiwa yang tidak pasti, yang artinya dapat membantu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Desanti, 2019, mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki anggota komisaris maupun direksi yang terhubung secara politik dianggap memiliki praktik tata kelola perusahaan yang buruk dan memiliki agensi yang lebih besar yang berakibat pada penerapan konservatisme akuntansi yang kurang dalam laporan keuangannya. Wu *et. al.*, (2012), perusahaan yang dipimpin oleh CEO yang terhubung secara politis cenderung memiliki dewan yang berasal dari birokrat dengan latar belakang kurang profesional. Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas tata kelola perusahaan dan menyiratkan efek negatif dari koneksi politik terhadap sensitivitas kinerja. Perusahaan dengan kualitas tata kelola perusahaan yang rendah akan cenderung tidak menerapkan konservatisme akuntansi yang tepat, terutama pada konservatisme akuntansi bersyarat, karena penerapan tata kelola perusahaan yang lebih rendah tidak akan menghasilkan penurunan terhadap konservatisme akuntansi bersyarat (Lara *et. al.*, 2009).

Rohadi (2018), mengemukakan pengaruh signifikan atribut dewan direksi terhadap konservatisme akuntansi. Menurut Putri (2016) atribut kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Fitriani (2014) yang menunjukkan hasil atribut komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan konstitusional berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Lara *et. al.*, (2009), dan Mohammed *et. al.*, (2017) menyebutkan adanya pengaruh dari koneksi politik terhadap konservatisme akuntansi, dengan pengukuran konservatisme menggunakan konservatisme akuntansi bersyarat.

Telaah Literatur Dan Pengembangan Hipotesis Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditor, dan manajer. Konflik yang dimaksud dapat dilihat dari kebijakan dividen, pendanaan, dan kebijakan investasi (Jensen dan Meckling, 1976). Informasi tentang perusahaan lebih banyak diketahui oleh manajer (*agent*) sebagai pengelola dibandingkan pemilik perusahaan (*principal*). Sehingga manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Pihak *agent* dituntut untuk mencurahkan kemampuannya dalam mengelola perusahaan, dan sedangkan dari pihak *principal* atau pemilik perusahaan, berkewajiban memberikan *fee* kepada pihak agen sebagai balas jasa (Fahmi 2014:19). Arfan Ikhsan Lubis dalam bukunya menjelaskan gambaran tentang teori keagenan, dari sudut pandang teori agensi, pemilik perusahaan (*principal*) membawahi manajer (*agent*) untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Adanya perbedaan kepentingan ini yang nanti akan berakibat menimbulkan asimetri informasi dan juga konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal*, dimana masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri (Lubis 2011:91 dalam Arrazzaq 2017).

Konservatisme Akuntansi

Konsep konservatisme diberlakukan jika manajer berada pada keadaan akuntansi yang tidak pasti namun harus menentukan pilihan terhadap perlakuan akuntansi maka atas dasar keadaan tersebut ia akan memilih perlakuan yang dianggap kurang menguntungkan. Misalnya dalam mengakui laba, seorang akuntan atau manajer memiliki alasan untuk mengharapkan tingkat analisa yang lebih cermat dan terperinci untuk mengakui keuntungan daripada mengakui rugi.

Haniati dan Fitriany (2010) dalam penelitiannya mengemukakan untuk dapat meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antara pihak *stockholder* dengan pihak *stakeholder* yang terjadi akibat adanya pemanfaatan asimetri informasi. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah sumber informasi utama bagi pemegang saham. Pemegang saham akan memperhatikan bagaimana manajer menerapkan prinsip konservatisme

akuntansi dalam estimasi keuangan mereka, karena menerapkan konservatisme akuntansi akan memberikan perlindungan lebih baik bagi pemegang saham (Cullinan *et al.*, 2012). Lara *et al.*, (2009) berpendapat bahwa konservatisme akuntansi, khususnya pada konservatisme akuntansi bersyarat memiliki pengaruh signifikan dengan tata kelola perusahaan, karena penerapan tata kelola perusahaan yang kuat maka permintaan terhadap penerapan konservatisme akuntansi akan kuat pula. Tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik jika ditunjuk komisaris independen yang bertugas sebagai mengawasi agar manajemen menjalankan perusahaan sesuai peraturan yang berlaku (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008).

Jenis-Jenis Konservatisme Akuntansi

Terdapat beragam jenis konservatisme, penyebutan mengenai 2 jenis konservatisme ini dapat dinamakan berbeda-beda, namun secara konseptual akan mengacu hanya kepada 2 jenis konservatisme saja, yaitu Konservatisme Bersyarat (Conditional Conservatism) dan *Ex ante* (*unconditional*) atau konservatisme tidak bersyarat.

TataKelolaPerusahaan (Corporate Governance)

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) bahwa *corporate governance* adalah seperangkat aturan tentang hubungan diantara berbagai pihak yaitu pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban diantara mereka (Achyani, Triyono, dan Wahyono, 2015). Menurut Rizqiasih (2010) esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Menurut Emirzon (2007) disebutkan bahwa mekanisme corporate governance juga dapat membawa beberapa manfaat sebagai berikut: a)Perbaikan dalam komunikasi; dalam posisi yang sejajar antara pemegang saham mayoritas, minoritas, dan asing serta *stakeholders* yang berkepentingan lain, akan tumbuh komunikasi yang baik dan saling keterbukaan. b)Minimisasi potensi benturan. c)Fokus

pada strategi-strategi utama. d)Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi. e) Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefit*). f)Promosi citra perusahaan (*corporate image*). g) Peningkatan kepuasan pelanggan. h)Peroleh kepercayaan investor.

Koneksi Politik (*Political Connections*)

Faccio (2010) menemukan bahwa perusahaan yang terhubung dengan *political connection* memang memiliki *leverage* yang lebih tinggi (misalnya, akses khusus terhadap kredit), tarif pajak yang lebih rendah (yaitu, diskon pajak), dan pangsa pasar yang lebih besar (yaitu, kekuatan pasar). Dengan berbagai keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan namun Chaney *et. al.*, (2011) menyatakan perusahaan dengan koneksi politik memiliki kualitas pelaporan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik, tetapi perusahaan tetap akan eksis dipasar modal karena dianggap *cost of debt* yang dimilikinya lebih rendah. Perusahaan yang memiliki anggota komisaris dan direksi yang terhubung secara politik dianggap memiliki praktik tata kelola perusahaan yang buruk dan masalah agensi yang lebih besar karena bergantung pada pemerintah, dalam hal ini akan terjadi masalah keuangan yang pada akhirnya menuntut penggunaan konservatisme akuntansi yang kurang dalam laporan keuangannya (Chen *et al.*,2010).

Menurut Faccio yang dikutip Anggraeni (2018) mengatakan perusahaan mempunyai koneksi politik dengan indikator, Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen, Perusahaan yang top eksekutif menjadi anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), menteri, dan atau mantan pejabat serta merupakan mantan anggota militer (purnawirawan polisi dan TNI), dan Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat secara langsung kedalam duniapolitik.

Earning per Share

Earning per share merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan (*return*) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar. Fahmi (2011:138) menyatakan *Earning per Share* atau

pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. *Earning per share* sebagai variabel kontrol memiliki keterikatan dengan konservatisme akuntansi, hal ini terjadi karena memungkinkan perusahaan mengendalikan peningkatan *earning per share* (EPS) secara merata, menunda pengakuan, dan mencatat biaya lebih tinggi.

Return

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi pada saham. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa mendatang Hartono (2010:205).

Firm Size

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka manajer perusahaan akan cenderung untuk menggunakan prosedur akuntansi yang menanggukhan laba dari periode sekarang ke periode yang akan datang (Rohadi, 2018). Noviantari dan Ratnadi (2015) juga menyatakan bahawa perusahaan dengan *size* besar cenderung akan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi agar laba yang dihasilkan tidak terlalu tinggi guna menghindari beban pajak (biaya politis) yang tinggi akibat laba yang tinggi. Hasil penelitian Noviantari dan Ratnadi (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumiari dan Wirama (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi

Leverage

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Risdiyani (2015) adanya tingkat *leverage* yang tinggi akan membuat perusahaan akan meningkatkan penerapan konservatisme dengan cara mengakui biaya lebih dini, untuk mengurangi biaya yang lebih besar yang mungkin muncul dan dapat memperbanyak hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Alhayati (2013) menyatakan bahwa tingkat hutang (*leverage*) berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Market to Book Value

Market to Book Value (MtBV) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh atau selisih antara nilai pasar perusahaan dengan nilai bukunya. Jika ternyata selisih antara nilai pasar dengan nilai buku perusahaan terlalu jauh (cukup signifikan), maka menandakan bahwa terdapat *hidden asset* yang tidak tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini berarti bahwa nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan sudah tidak berarti lagi. Apabila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka dapat menyesatkan, karena nilai perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan bukan nilai perusahaan yang sebenarnya. (Imaningati, 2007).

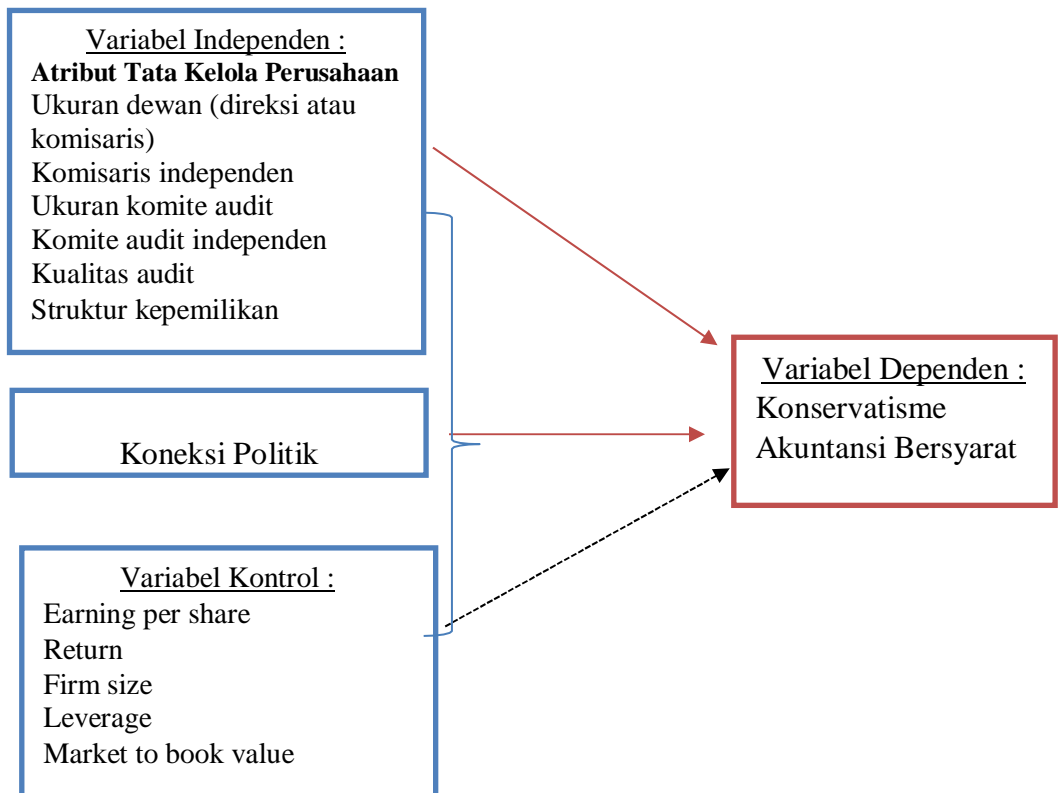
Penelitian Terdahulu

David Rohadi (2018), dalam penelitiannya Ukuran dewan direksi dan leverage berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi sedangkan dewan komisaris independen, ukuran komite audit, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan

terhadap konservatisme akuntansi. Nor Farizal Mohammed Kamran Ahmed Xu- Dong Ji (2017), menyatakan Terdapat akuntansi konservatisme bersyarat di Malaysia, variabel proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan CEO Duality secara signifikan berpengaruh terhadap akuntansi konservatisme, Koneksi politik dan kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap akuntansi konservatisme sedangkan ukuran dewan, ukuran komite audit, audit committee financial expertise, BIG 4, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap akuntansi konservatisme. Irna Yolanda Putri (2016), Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi sedangkan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Fitriani (2014), Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi, kepemilikan saham institusional berpengaruh signifikan terhadap konservatisme, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Lara et al., (2009), Tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian menggunakan atribut tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit, komite audit independen, kualitas audit dan struktur kepemilikan dengan konservatisme akuntansi bersyarat, dan untuk variabel independen lainnya yang menggunakan koneksi politik yang diduga kedua variabel ini memiliki pengaruh dengan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi bersyarat, berdasarkan penelitian Mohammed *et. al.*, (2017). Berdasarkan kerangka penelitian selain variabel independen, terdapat variabel kontrol yaitu *earning per share*, *firm size* dan *leverage* (Khan & Watts, 2009) yang sejalan dengan penelitian Ahmed dan Duellman (2007), *market to book value* Roychowdhury (2007), dan *return* (LaFond & Watts, 2007).



Pengembangan Hipotesis

- H₁:** Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- H₂:** Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- H₃:** Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- H₄:** Ukuran komite audit signifikan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- H₅:** Komite audit independen berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- H₆:** Keahlian audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- H₇:** Kualitas KAP (BIG4) berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- H₈:** Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- H₉:** Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- H₁₀:** Koneksi politik berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.

Metode Penelitian

Desain pada penelitian berdasarkan metode pengumpulan data adalah penelitian historis, penelitian survey dan penelitian *ex post facto*. Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi bersyarat, variabel independen dalam penelitian ini adalah tata kelola perusahaan dan koneksi politik (*political connection*), dan variabel kontrol yaitu *earning per share, return, market to book value*, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melihat laporan keuangan perusahaan pada tahun 2012-2018. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu, 1)Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangannya untuk periode 2012-2018. 2)Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah dan pelaporan keuangan berakhir pada 31 Desember. Perusahaan non keuangan yang melaporkan laporan keuangan dengan mata uang non rupiah tidak dijadikan sampel dalam penelitian, 3)Perusahaan yang melaporkan akun yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan variabel dalam penelitian, dan 4)Perusahaan yang melaporkan laba bersih yang dihasilkan positif dan lebih rendah dari pada arus kas operasi. Karena jika laba yang dihasilkan lebih tinggi berarti perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi bersyarat. Data diperoleh melalui situs www.sahamok.com dan www.idx.co.id.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis regresi berganda. Model persamaan regresi berganda yang akan diteliti dalam pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut merujuk penelitian Mohammed et al., (2017):

$$CONACC = \beta_0 \pm \beta_1 BSIZE \pm \beta_2 BIND \pm \beta_3 ACSIZE \pm \beta_4 ACIND \pm \beta_5 ACEXPRT \pm \beta_6 BIG4 \pm \beta_7 MAGTOWN \pm \beta_8 GOVOWN \pm \beta_9 POLCON \pm \beta_{10} EPS \pm \beta_{11} Rt \pm \beta_{12} MTB \pm \beta_{13} Size \pm \beta_{14} Lev \pm \epsilon$$

Keterangan:

CONACC	: Konservatisme akuntansi <i>Q-Score</i>
BSIZE	: Ukurantotaldewandireksi atau dewankomisaris
BIND	: Total komisaris independen
ACSIZE	: Ukuran total komite audit
ACIND	: Total komite audit independen
ACEXPRT	: Rasio keahlian komite audit di bidang keuangan
BIG4	: <i>Dummyvariable</i> , 1 untuk yang terkait dengan BIG 4, 0 untuk yang tidak
MAGTOWN	: Rasio kepemilikan manajemen dalam perusahaan
GOVOWN	: Rasio kepemilikan institusional dalam perusahaan
POLCON	: <i>Dummyvariable</i> , 1 untuk yang terkait dengan

politik, 0 untuk yang tidak

EPS : *Earning pershare* sebagai variabel kontrol

Rt : *Return* saham sebagai variabel kontrol

MTB : *Markettobookvalue* sebagai variabel kontrol

Size : Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol

Lev : *Leverage* perusahaan, total hutang dibagi total

Aset sebagai variabel kontrol

ϵ : Variabel gangguan perusahaan

Hasil dan Pembahasan

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS. Namun, dari hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa model regresi terdapat masalah heterokedastisitas sehingga pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi *weighted least square*.

Tabel 1
Hasil Pengujian Hipotesis (dengan Dewan Komisaris)

Model	Koefisien	T	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	-0,643	-3,821	0,000	
BCOM	0,021	3,747	0,000	Diterima
BIND	-0,136	-1,923	0,055	Ditolak
ACSIZE	0,054	2,984	0,003	Diterima
ACIND	-0,178	-2,869	0,004	Diterima
ACEPERT	-0,028	-0,514	0,607	Ditolak
BIG4	0,022	1,751	0,081	Ditolak
MAGTOWN	-0,165	-1,775	0,077	Ditolak
INTOWN	0,162	7,113	0,000	Diterima
POLCON	-0,050	3,589	0,000	Diterima
LEV	-0,064	-1,838	0,067	Ditolak
MTB	0,015	1,474	0,141	Ditolak
EPS	-3,025	-5,427	0,000	Diterima
RETURN	0,000	-0,030	0,976	Ditolak
SIZE	0,011	2,318	0,021	Diterima

R ²	0,657
Adjusted R ²	0,648
F	76,396
Sig.	0,000

Sumber: data sekunder diolah tahun 2020

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis (dengan Dewan Direksi)

Model	Koefisien	T	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	-0,731	-3,877	0,000	
BDIR	-0,013	-2,349	0,119	Ditolak
BIND	-0,195	-2,480	0,113	Ditolak
ACSIZE	0,068	3,618	0,000	Diterima
ACIND	-0,168	-2,492	0,113	Ditolak
ACEPERT	0,001	0,026	0,980	Ditolak
BIG4	0,026	1,618	0,106	Ditolak
MAGTOWN	-0,145	-1,387	0,166	Ditolak
INTOWN	0,136	5,315	0,000	Diterima
POLCON	-0,076	4,785	0,000	Diterima
LEV	-0,004	-0,112	0,911	Ditolak
MTB	0,014	1,319	0,188	Ditolak
EPS	-9,413	-0,926	0,355	Ditolak
RETURN	0,006	-0,562	0,574	Ditolak
SIZE	0,017	2,961	0,003	Diterima
R ²	0,269			
Adjusted R ²	0,251			
F	14,711			
Sig.	0,000			

Sumber: data sekunder diolah tahun 2020

Variabel Kontrol

Pengaruh *Leverage* Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat yang diukur dengan ukuran dewan komisaris dan direksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai utang perusahaan yang dijadikan sampel maka perusahaan cenderung tidak menerapkan konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangannya.

Pengaruh *Market to Book Value* Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *market to book value* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat yang diukur dengan ukuran dewan komisaris dan direksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pasar saham suatu perusahaan maka perusahaan cenderung tidak menerapkan konservatisme akuntansi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang dijadikan sampel memiliki nilai pasar saham yang tinggi, dalam keadaan ini biasanya perusahaan sudah mempercantik laporan keuangan dengan meningkatkan nilai akrualnya.

Pengaruh *Earning per Share* Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *earning per share* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi bersyarat yang diukur dengan ukuran dewan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham yang dibagikan maka akan semakin rendah penerapan konservatisme akuntansi dalam suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena laba yang diterima perusahaan yang dijadikan sampel cenderung akrual. Hasil ini tidak sejalan dengan pengukuran yang dilakukan menggunakan ukuran dewan direksi. Karena hasil *earning per share* diukur dengan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh.

Pengaruh *Return* Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *return* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat yang diukur dengan ukuran

dewan komisaris dan direksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *return* atau tingkat pengembalian investasi suatu perusahaan maka perusahaan cenderung tidak menerapkan konservatisme akuntansi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang menjadi sampel lebih dominan membagikan *dividen* kepada investor tidak dalam bentuk *dividen* kas, hal ini tidak sejalan dengan penerapan konservatisme akuntansi yang cenderung berbasis kas.

Pengaruh *Size* Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *size* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat yang diukur dengan ukuran dewan komisaris dan diukur dengan menggunakan dewan direksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka penerapan konservatisme akuntansi dalam perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Pada perusahaan berukuran besar, asimetri informasi relatif lebih kecil karena akan mengungkapkan lebih banyak informasi kepada publik, sehingga perusahaan akan lebih konservatif dalam melaporkan keuangannya.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda dengan sampel perusahaan *non*-keuangan yang berada di Indonesia, menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi bersyarat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran dewan komisaris dalam sebuah perusahaan maka penerapan konservatisme akuntansi bersyarat dalam suatu perusahaan akan meningkat juga. Hasil pengujian ini sejalan dengan teori keagenan, dimana teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditur, dan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan tata kelola perusahaan sebagai sebuah bentuk aturan tentang hubungan diantara berbagai pihak yang dapat mengurangi konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan. Salah satu mekanisme dari tata kelola perusahaan adalah dewan komisaris. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dewan komisaris adalah sebuah

dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur. Lara et al., (2009) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang kuat sebagai mekanisme *corporate governance* mensyaratkan tingkat konservatisme akuntansi yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan komisaris yang lemah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Fitriani (2014) yang menunjukkan pengaruh antara dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Variabel ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat. Merujuk hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat tidak terbukti. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yaitu teori yang menjelaskan tentang konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan yaitu investor, kreditor, dan manajer. Dalam hal ini dibutuhkan dewan direksi sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* yang diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan.

KNKG (2011) mengatakan bahwa agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat. Menurut pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, mengenai komposisi atau jumlah dewan direksi, memang tidak dinyatakan secara kuantitatif, namun jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan. Hasil penelitian mengenai tidak berpengaruhnya ukuran dewan direksi terhadap konservatisme akuntansi bersyarat tidak sejalan dengan penelitian Lara, et.al. (2007) dan Rohadi (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat, baik dengan menggunakan ukuran dewan komisaris maupun dengan ukuran dewan direksi. Merujuk hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat tidak terbukti. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yaitu teori yang menjelaskan tentang konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan yaitu investor, kreditur, dan manajer. Dalam hal ini dibutuhkan komisaris independen sebagai salah satu komponen mekanisme *corporate governance* yang diharapkan dapat berfungsi untuk memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris.

Tidak berpengaruhnya komisaris independen terhadap konservatisme akuntansi bersyarat dikarenakan pengawasan dari dewan komisaris independen yang kurang optimal sebagai alat pengawasan manajemen, selain itu keberadaan dari banyaknya komisaris independen dalam perusahaan *non-keuangan* yang digunakan sebagai sampel tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Akibat dari keadaan ini, pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dalam perusahaan dalam sampel penelitian belum efektif untuk digunakan sebagai alat dalam mengawasi kinerja manajemen. Hasil penelitian mengenai tidak berpengaruhnya komisaris independen terhadap konservatisme akuntansi bersyarat tidak sejalan dengan penelitian Yustina (2011) dan Fitriani (2014) yang menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat, baik dengan menggunakan ukuran dewan komisaris maupun dengan ukuran dewan direksi. Merujuk hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa

ukuran komite audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat terbukti. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yaitu teori yang menjelaskan tentang konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan yaitu investor, kreditur, dan manajer. Dalam hal ini dibutuhkan komite audit sebagai salah satu komponen mekanisme *corporate governance* yang diharapkan dapat membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Semakin banyak komite audit, maka semakin tinggi optimalisasi fungsi komite audit. Hasil penelitian mengenai berpengaruhnya ukuran komite audit terhadap konservatisme akuntansi bersyarat sejalan dengan penelitian Wardhani (2008), Fitriani (2014), dan IWayan (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Komite audit independen memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat, namun tidak terjadi pengaruh jika diukur dengan ukuran dewan direksi. Merujuk hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan bahwa komite audit independen berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat terbukti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yaitu teori yang menjelaskan tentang konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan yaitu investor, kreditur, dan manajer. Untuk meminimalkan masalah keagenan ini dibutuhkan mekanisme *corporate governance*. Komite audit independen sebagai faktor yang dapat mendukung independensi komite audit yang mana merupakan bagian dari komponen mekanisme *corporate governance*. Hal ini dikarenakan komite audit independen yang diukur dengan banyaknya komite audit independen dibagi jumlah total komite audit ini dapat digunakan sebagai tolak ukur seberapa besar independensi komite audit dalam suatu perusahaan. Berpengaruhnya komite audit independen terhadap konservatisme akuntansi bersyarat dikarenakan pada perusahaan *non*-keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian memiliki jumlah komite audit independen yang sebanding dengan komite

audit dalam perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lary & Taylor (2012) yang menunjukkan bahwa komite audit independen memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Pengaruh Keahlian Keuangan Auditor Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Keahlian keuangan auditor tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat, baik dengan menggunakan ukuran dewan komisaris maupun dengan ukuran dewan direksi. Merujuk hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan bahwa keahlian keuangan auditor berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat tidak terbukti. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yaitu teori yang menjelaskan tentang konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan yaitu investor, kreditor, dan manajer. Dalam hal ini dibutuhkan komite audit sebagai salah satu komponen mekanisme *corporate governance*. Sebagai salah satu faktor pendukung komite audit harus memiliki keahlian salah satunya di bidang keuangan, dengan begitu komite audit dapat menunjukkan bahwa dengan baiknya kompetensi komite audit maka mekanisme pengawasan akan menjadi lebih baik sehingga dapat mencegah pihak manajemen melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Merujuk dari nilai minimum variabel ACEXPRT dalam statistik deskriptif masih terdapat perusahaan yang menjadi sampel penelitian tidak mengungkapkan bahwa auditornya memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, dengan nilai sebesar 0,000. Hasil penelitian mengenai pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap konservatisme akuntansi bersyarat tidak sejalan dengan penelitian Olyhoek (2017) yang menunjukkan hasil bahwa keahlian keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.

Pengaruh Kualitas KAP (BIG 4) Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Kualitas KAP yang diprosikan dengan BIG 4 tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat, baik dengan menggunakan ukuran dewan komisaris maupun dengan ukuran dewan

direksi. Merujuk hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa kualitas KAP yang diprosikan dengan BIG 4 berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat tidak terbukti. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yaitu teori yang menjelaskan tentang konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan yaitu investor, kreditur, dan manajer. Agar terjalinnya hubungan antar para pemangku kepentingan dibutuhkan informasi yang dihasilkan oleh pihak eksternal agar terjamin indenpendensi dari informasi tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah kantor akuntan publik (KAP) yang memiliki kompetensi yang baik, KAP ini biasa dikenal dengan KAP Big4. Beberapa alasan sampai saat ini perusahaan lebih memilih memakai jasa KAP Big4 karena dipercaya memiliki kualitas audit yang lebih baik. Hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas KAP (BIG4) terhadap konservatisme akuntansi bersyarat tidak sejalan dengan penelitian Veres (2013) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas KAP secara signifikan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat, baik dengan menggunakan ukuran dewan komisaris maupun dengan ukuran dewan direksi. Merujuk hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat tidak terbukti. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan dimana menurut Jensen dan Meckling (1976) bahwa dengan terkonsentrasi kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat dan cenderung menekan konflik keagenan. Tingkat kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi bersyarat tidak sejalan dengan penelitian Fatmariyani (2008) dan Limantauw (2010) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Kepemilikan insitusal memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat, baik dengan menggunakan ukuran dewan komisaris maupun dengan ukuran dewan direksi. Merujuk hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat terbukti. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dimana menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan, yang mampu untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyanto, 2007). Hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap konservatisme akuntansi bersyarat sejalan dengan penelitian El-Haq (2019) menunjukkan pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap konservatisme akuntansi.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Konservatisme Akuntansi Bersyarat

Koneksi politik memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat, baik dengan menggunakan ukuran dewan komisaris maupun dengan ukuran dewan direksi. Merujuk hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kesepuluh yang menyatakan bahwa kepemilikan koneksi politik berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat terbukti. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dimana menurut Jensen dan Meckling (1976) yang mana teori ini menjelaskan tentang konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan yaitu investor, kreditur, dan manajer. Dalam keadaan ini perusahaan yang memiliki mekanisme terkoneksi politik seperti komisaris dan direksi yang terhubung secara politik dianggap memiliki praktik tata kelola perusahaan yang buruk dan masalah agensi yang lebih besar karena bergantung pada pemerintah, dalam hal ini akan terjadi masalah keuangan yang pada akhirnya menuntut penggunaan

konservatisme akuntansi yang kurang dalam laporan keuangannya (Chen et al., 2010). Merujuk hasil uji regresi, terdapat pengaruh negatif dari koneksi politik terhadap konservatisme akuntansi bersyarat. Artinya semakin tinggi perusahaan terindikasi koneksi politik maka semakin rendah penerapan konservatisme akuntansi dalam perusahaan ini. Hal ini dikarenakan Hasil penelitian mengenai pengaruh koneksi politik terhadap konservatisme akuntansi bersyarat sejalan dengan penelitian oleh Mohammed et al. (2017) dan Wahab (2014) menunjukkan pengaruh signifikan antara koneksi politik terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dewan komisaris sebagai mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- 2) Dewan direksi sebagai mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- 3) Komisaris independen sebagai mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- 4) Ukuran komite audit sebagai mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- 5) Komite audit independen sebagai pendukung dalam mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- 6) Keahlian keuangan auditor sebagai pendukung dalam mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- 7) Kualitas KAP sebagai pendukung dalam mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- 8) Kepemilikan manajerial sebagai pendukung dalam mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) tidak memiliki pengaruh

terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.

- 9) Kepemilikan institusional sebagai pendukung dalam mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- 10) Koneksi sebagai pendukung dalam mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi bersyarat.
- 11) Variabel kontrol seperti *leverage*, *market to book value*, dan return tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme bersyarat.
- 12) *Earning per share* sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme bersyarat.
- 13) Ukuran perusahaan (*size*) sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh terhadap konservatisme bersyarat.

Bibliografi

- Achyani, F., Triyono, & Wahyono. (2015). Pengaruh Praktik Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. *University Research Colloquium*.
- Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2007). Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: an Empirical Analysis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.887301>
- Anggraeni, R. (2018). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Aggressiveness. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Arrazzaq, G. P. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015. *Artikel Ilmiah*. <https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004>
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Desanti, E. (2019). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Konservatisme Akuntansi. *Undergraduate Thesis*.
- El-haq, Z. N. S. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Growth Opportunities, dan Profitabilitas terhadap*

Konservatisme Akuntansi. 11(2).

- Emirzon, J. (2007). *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Faccio, M., Dinç, S., Djankov, S., Fisman, R., Giannetti, M., Green, R., ... Stolin, D. (2010). Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis. *Financial Management*, (1), 905–927.
- Fitriani, S. (2014). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Konservatisme Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*.
- García Lara, J. M., García Osma, B., & Penalva, F. (2009). Accounting conservatism and corporate governance. *Review of Accounting Studies*, 14(1). <https://doi.org/10.1007/s11142-007-9060-1>
- Haniati, S., & Fitriany. (2010). *Pengaruh Konservatisme Terhadap Asimetri Informasi Dengan Menggunakan Beberapa Model Pengukuran Konservatisme*.
- I Wayan, P. (2015). Tingkat Konservatisme Akuntansi: Kajian Dewan Komisaris, Modal Manajerial, Dan Komite Audit Dalam Mekanisme Good Corporate Governance. *E-Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3,305–360. <https://doi.org/10.1002/mde.l218>
- Khan, M., & Watts, R. L. (2009). Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism. *Journal of Accounting and Economics*, 48(2–3). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.08.002>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2011). Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria Indonesia. [Http://Www.Knkg-Indonesia.Org/Dokumen/Pedoman-GCG-Konsultan-Aktuaria.Pdf](http://Www.Knkg-Indonesia.Org/Dokumen/Pedoman-GCG-Konsultan-Aktuaria.Pdf), 1–50. <https://doi.org/10.1097/QAD.0b013e32833e77c9>
- Kootanaee, A. J., Seyyedi, J., Nedaei, M., & Kootanaee, M. J. (2013). Accounting Conservatism and Corporate Governance's Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics, Business and Finance*, 1(10), 301–319. Retrieved from <http://ijebf.com/>
- LaFond, R., & Roychowdhury, S. (2007). Managerial Ownership and Accounting Conservatism. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.929693>
- LaFond, R., & Watts, R. L. (2007). The information role of conservatism.

- Accounting Review*, 83(2).<https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.2.447>
- Lara, J. M. G., Osma, B. G., & Penalva, F. (2007). Board of directors' characteristics and conditional accounting conservatism: Spanish evidence. In *European Accounting Review* (Vol. 16).
<https://doi.org/10.1080/09638180701706922>
- Mohammed, N. F., Ahmed, K., & Ji, X.-D. (2017). Accounting Conservatism, Corporate Governance and Political Connections. *Asian Review of Accounting*, 25(2), 232–255. <https://doi.org/10.1108/ARA-04-2012-0017>
- Nasr, M. A., & Ntim, C. G. (2018). Corporate governance mechanisms and accounting conservatism: evidence from Egypt. *Corporate Governance (Bingley)*, 18(3), 386–407. <https://doi.org/10.1108/CG-05-2017-0108>
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2016). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agrevisitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Prastowo, Y. (2019). *Kasus Garuda dan Misteri Akuntansi*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2019/07/18/152000526/kasus-garuda-dan-misteri-akuntansi?page=all>
- Putri, I. Y. (2016). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2012-2014*.
- Rachman, F. F., & Afriyadi, A. D. (2020). *Rekayasa Akuntansi di Jiwasraya Terkuak*.
- Rizqiasih, P. D. (2010). Pengaruh Struktur Governance Terhadap Fee Audit Eksternal. In *Skripsi*.
- Rohadi, D. (2018). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme*.
- Runch, G. W., & Taylor, G. (2015). Accounting conservatism: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 34, 17–38. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2015.02.001>
- Sari, D. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Voluntary Disclosure dan Ukuran Perusahaan Terhadap Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas Bandung*, 16–54.
- Veres, M. (2013). 183538-ID-none. 2(1), 1–17.

- Wardhani, R. (2008). Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak (23-24 Juli), XI, 1–26*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy, 31*(3),277–300. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005>